



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 16
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN KODE WILAYAH KEARSIPAN
SURAT/NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Kode Wilayah Kearsipan Surat/Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Kode Wilayah Kearsipan Surat/Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 113 Tahun 2019;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan;
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan;
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan;
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan;
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan;

21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan;
22. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan;
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2018;
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN KODE WILAYAH KEARSIPAN SURAT/NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Kode Wilayah Kearsipan Surat/Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 113 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 113) yaitu mengubah kode wilayah Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 7 Agustus 2020
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 7 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 49

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 49 TAHUN 2020
 TANGGAL : 7 Agustus 2020

**PERUBAHAN KODE WILAYAH KEARSIPAN SURAT/NASKAH DINAS
 PADA PERANGKAT DAERAH DAN BUMD DI LINGKUNGAN
 KABUPATEN PASURUAN**

424 . 000	SEKRETARIAT DAERAH	
424 . 010	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	424 . 011	Bagian Tata Pemerintahan
	424 . 012	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	424 . 013	Bagian Hukum
424 . 020	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
	424 . 021	Bagian Perekonomian
	424 . 022	Bagian Administrasi Pembangunan
	424 . 023	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
424 . 030	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
	424 . 031	Bagian Umum
	424 . 032	Bagian Organisasi
	424 . 033	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	424 . 034	Bagian Perencanaan dan Keuangan
424 . 040	STAF AHLI BUPATI	
	424 . 041	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
	424 . 042	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
	424 . 043	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
424 . 050	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	424 . 051	Bagian Umum
	424 . 052	Bagian Rapat dan Peraturan Perundang-undangan
	424 . 053	Bagian Keuangan
424 . 060	INSPEKTORAT	
424 . 070	DINAS DAERAH	
	424 . 071	Dinas Pendidikan
	424 . 072	Dinas Kesehatan
	424 . 073	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
	424 . 074	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang
	424 . 075	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	424 . 076	Satuan Polisi Pamong Praja
	424 . 077	Dinas Sosial

	424 . 078	Dinas Tenaga Kerja
	424 . 079	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	424 . 080	Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
		Perempuan
	424 . 081	Dinas Lingkungan Hidup
	424 . 082	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	424 . 083	Dinas Perhubungan
	424 . 084	Dinas Komunikasi dan Informatika
	424 . 085	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	424 . 086	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
	424 . 087	Dinas Pemuda dan Olahraga
	424 . 088	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	424 . 089	Dinas Perikanan
	424 . 090	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	424 . 091	Dinas Pertanian
	424 . 092	Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan
	424 . 093	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
424 . 100	BADAN DAERAH	
	424 . 101	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	424 . 102	Badan Keuangan Daerah
	424 . 103	Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan
		Daerah
	424 . 104	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	424 . 201	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	424 . 202	Dihapus
424 . 300	KECAMATAN	
	424 . 301	Kecamatan Bangil
	424 . 302	Kecamatan Beji
	424 . 303	Kecamatan Gempol
	424 . 304	Kecamatan Gondangwetan
	424 . 305	Kecamatan Grati
	424 . 306	Kecamatan Kejayan
	424 . 307	Kecamatan Kraton
	424 . 308	Kecamatan Lekok
	424 . 309	Kecamatan Lumbang
	424 . 310	Kecamatan Nguling
	424 . 311	Kecamatan Pandaan
	424 . 312	Kecamatan Pasrepan
	424 . 313	Kecamatan Pohjentrek
	424 . 314	Kecamatan Prigen
	424 . 315	Kecamatan Purwodadi
	424 . 316	Kecamatan Purwosari
	424 . 317	Kecamatan Puspo
	424 . 318	Kecamatan Rejoso
	424 . 319	Kecamatan Rembang
	424 . 320	Kecamatan Sukorejo

	424 . 321	Kecamatan Tosari
	424 . 322	Kecamatan Tukur
	424 . 323	Kecamatan Winongan
	424 . 324	Kecamatan Wonorejo
424 . 400	BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)	
	424 . 401	PDAM
	424 . 402	PT. Jalan Tol
	424 . 403	PT. PASURUAN MIGAS
	424 . 404dst

BUPATI PASURUAN

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF